



Article Informations
Corresponding Email:
augiaeriska@gmail.com

Received: 08/05/2025; Accepted:
20/08/2025; Published: 15/10/2025

INTERVENSI HOLY SEE ATAS KASUS PELECEHAN DAN KEKERASAN ANAK DI KEUSKUPAN BALTIMORE, MARYLAND, MELALUI UNITED NATIONS CONVENTIONS ON THE RIGHTS OF THE CHILD (UNCRC) TAHUN 2018-2023

Augia Eriska¹, Agus Subagyo², Muhammad Fauzan Alamari³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana status ganda *Holy See* sebagai negara berdaulat dan entitas keagamaan memengaruhi tanggung jawabnya dalam kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah kerangka *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka *norm resistance* serta konsep *norm antipreneurs*, penelitian ini berargumen bahwa *Holy See* secara aktif menolak pemaksaan norma akuntabilitas internasional, khususnya dalam kasus pelecehan seksual anak di Keuskupan Agung Baltimore. Analisis dilakukan terhadap dokumen sekunder seperti laporan investigasi, pernyataan resmi, dan tanggapan institusional. Analisis dilakukan terhadap dokumen sekunder seperti laporan investigasi, pernyataan resmi, dan tanggapan institusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Holy See* tidak mengikuti norma internasional secara penuh, melainkan memanfaatkan status diplomatik dan otoritas moralnya untuk mempertahankan otonomi internal dan menunda pertanggungjawaban. Strategi penolakan ini tidak hanya menghambat perlindungan hak anak, tetapi juga memperlihatkan tantangan bagi efektivitas sistem hak asasi manusia internasional dalam menghadapi aktor yang memiliki legitimasi moral dan politik.

Kata Kunci: Holy See, hak anak, UNCRC, pelecehan seksual anak,

Abstract

This study examines how the dual status of the Holy See as both a sovereign state and a religious institution influences its responsibilities in addressing cases of child sexual abuse under the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). Using a qualitative approach and the frameworks of norm resistance and norm antipreneurs, the research argues that the Holy See actively resists the implementation of international accountability norms, particularly in the case of child sexual abuse in the Archdiocese of Baltimore. The analysis is based on secondary data, including investigative reports, official statements, and institutional responses. The findings show that rather than complying with international standards, the Holy See uses its

diplomatic status and moral authority to maintain internal autonomy and delay accountability. This strategy of resistance not only weakens the enforcement of children's rights but also reveals the challenges faced by international human rights mechanisms when dealing with actors that hold both moral and political legitimacy.

Keywords: *Holy See, child rights, UNCRC, child sexual abuse*

1. PENDAHULUAN

Holy See, atau *Sancta Sedes* dalam bahasa Latin yang berarti "Tahta Suci", merujuk pada otoritas pusat pemerintahan Gereja Katolik universal, merupakan negara berdaulat yang diakui oleh hukum internasional sekaligus pemerintah pusat yang membuat keputusan juga kebijakan yang mencakup masalah keimanan dan moralitas bagi umat Katolik di seluruh dunia.¹ *Holy See*, sebagai salah satu aktor non-negara yang berperan penting dalam dinamika hubungan internasional kontemporer, memegang status unik sebagai negara berdaulat sekaligus institusi keagamaan internasional yang menaungi Gereja Katolik di seluruh dunia. Status ganda ini menjadikan *Holy See* sebagai partisipan yang signifikan dalam hubungan internasional.

Gereja Katolik sebagai badan yang berada di bawah otoritas langsung *Holy See*, merupakan institusi keagamaan tertua di dunia yang mewakili simbol perlindungan, penebusan dosa, dan belas kasih Tuhan. Namun, Dalam beberapa dekade terakhir ini, Gereja Katolik menghadapi badai tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak, dengan kasus-kasus yang mencuat sejak tahun 1950-an hingga saat ini di berbagai belahan dunia. Salah satu rangkaian kasus yang menjadi sorotan utama dalam permasalahan pelecehan seksual di kalangan klerus Gereja Katolik adalah rangkaian kasus yang terjadi di negara bagian Maryland, tepatnya di lingkungan Keuskupan Baltimore, yang dianggap sebagai salah satu yang paling mengerikan.² Pada tahun 2023, Kejaksaan Umum Maryland menerbitkan laporan lebih dari 450 halaman yang telah disunting dan telah

¹ R Ostberg, "Holy See," Encyclopedia Britannica, 2024, <https://doi.org/10.18356/9789213585009c194>.

² William F Zorzi, "After Years of Investigation and Heartbreak, Report Detailing 'Horrendous' Allegations against Clergy Is Released," *Maryland Matters*, April 6, 2023, <https://marylandmatters.org/2023/04/06/after-years-of-investigation-and-heartbreak-report-detailing-horrendous-allegations-against-clergy-is-released/>.

mengidentifikasi sebanyak 156 pastor, diakon³, guru, dan seminarian⁴ di lingkungan Keuskupan Agung Baltimore yang dituduh melakukan kekerasan fisik dan pelecehan seksual terhadap lebih dari 600 anak dalam kurun waktu lebih dari 80 tahun.⁵

Laporan tersebut mencatat bahwa para pemimpin gereja lebih berfokus pada upaya menutupi kasus-kasus kekerasan tersebut agar tidak muncul ke permukaan daripada menghentikan siklus kekerasan dan pelecehan atau melindungi korban.⁶ Pada hakikatnya, *Holy See* tidak mengontrol langsung seluruh gereja di dunia melampaui yurisdiksi teritorialnya, namun otoritas dan tanggung jawabnya tetap berlaku di bawah Hukum Kanonik yang menjadi pedoman bagi para uskup dalam menjalankan keuskupan mereka, termasuk prosedur penanganan pastor yang melanggar aturan atau melakukan tindakan tidak pantas.^{7,8} Hukum Kanonik ini juga terkait erat dengan hak dan kewajiban *Holy See* di bawah Konvensi Hak-Hak Anak (UNCRC). Meski *Holy See* sebagai organisasi internasional memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk melindungi hak-hak anak, keberadaan reservasi dan Hukum Kanonik seringkali memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas upaya perlindungan tersebut.⁹ Hal ini terutama relevan dalam konteks kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak di Keuskupan Baltimore, Maryland, Amerika Serikat.

Posisi *Holy See* yang unik dalam meratifikasi *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) semakin memperumit persoalan ini. Walaupun *Holy See* menyatakan prioritasnya dalam menangani kasus

³ Anggota diakonat, yaitu jabatan pelayanan di Gereja.

⁴ Merupakan pria yang sedang mempertimbangkan panggilan Tuhan untuk menjadi pendeta di Gereja Katolik Roma.

⁵ CBS Baltimore Staff, "Read the Full Redacted Report on Sex Abuse in Baltimore Archdiocese Released by AG's Office," *CBS News*, April 5, 2023, <https://www.cbsnews.com/baltimore/news/read-the-full-redacted-report-sex-abuse-baltimore-archdiocese-church-wjz/>.

⁶ F Maniscalco, "Media Reports on the Sexual Abuse Crisis in the Catholic Church" (Washington, 2005).

⁷ William Thomas Worster, "The Human Rights Obligations of the Holy See under the Convention on the Rights of the Child," *Duke Journal of Comparative & International Law* 31, no. 351 (2019): 351-423, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3470010>.

⁸ Hukum internal gerejawi yang mengatur Gereja Katolik.

⁹ Gabriela Hidalgo, "Recurring Cardinal Sins: How the Holy See and Canon Law Have Perpetuated Child Sexual Abuse," *Children's Legal Rights Journal* 39, no. 2 (2019), <https://lawecommons.luc.edu/clrj/vol39/iss2/4>.

pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak melalui Hukum Kanonik, banyak pihak yang meragukan dan mempertanyakan sejauh mana komitmen dan konsistensinya dalam memenuhi tanggung jawab tersebut.¹⁰ Hal ini terutama relevan mengingat perannya sebagai induk dari institusi Gereja Katolik sekaligus pihak yang terikat pada ketentuan dan tanggung jawab dalam UNCRC.¹¹

Tujuan kegiatan penelitian ini adalah mengungkap mekanisme bagaimana status ganda Holy See, sebagai negara berdaulat sekaligus institusi religius, memengaruhi pelaksanaan tanggung jawabnya terhadap kasus pelecehan dan kekerasan seksual anak di Keuskupan Agung Baltimore. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian akan dimulai dengan analisis dokumen resmi—termasuk laporan Kejaksaan Negeri Maryland (2018–2023), teks UNCRC beserta reservasi Holy See—dan dilanjutkan dengan tinjauan teoritis yang mencakup konstruktivisme, teori norm life cycle, serta studi tentang norm antipreneurs dan resistance. Selanjutnya, melalui studi kasus Baltimore, penelitian akan melacak kronologi intervensi Holy See untuk mengidentifikasi pola-pola hambatan normatif. Akhirnya, sintesis temuan akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas institusional dan perlindungan anak di tingkat global.

Dalam merangkai kajian ini, penelitian berpegang pada literatur utama mengenai status hukum Holy See, efektivitas UNCRC dalam konteks institusi keagamaan, dan interaksi keduanya. Morss (2016) menyoroti personalitas hukum unik Holy See dalam hukum internasional, sementara Langlaude (2008) mengkritik efektivitas pasal-pasal UNCRC terkait perlindungan anak oleh institusi agama. Lebih jauh, Danisi dan Caprara (2024) mengeksplorasi ketegangan antara imunitas Holy See dan implementasi hak anak di ranah internasional. Pemahaman terhadap ketiga bidang kajian ini membentuk

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Carmelo Danisi, Tomas Caprara, and University of Bologna, “The UNCRC and The Holy See: How Issues of Statehood, Attribution, and Immunity Constrain Children’s Rights,” *Amicus Curiae* 5, no. 3 (2024): 493–510, <https://doi.org/10.14296/ac.v5i3.5708>.

fondasi konseptual untuk menggali bagaimana strategi norm antipreneurs—seperti delaying tactics dan reframing—dikembangkan dan dijalankan oleh Holy See dalam kasus Baltimore.

2. PEMBAHASAN

DINAMIKA PERTANGGUNGJAWABAN HOLY SEE DALAM KASUS PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI KEUSKUPAN BALTIMORE

2.1 Respons Holy See Terhadap Kasus Keuskupan Baltimore

Rangkaian kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan klerus Gereja Katolik di negara bagian Maryland, tepatnya di lingkungan Keuskupan Baltimore, telah dianggap sebagai salah satu coretan sejarah yang paling mengerikan.¹² Keuskupan Baltimore sendiri menaungi sejumlah 486.607 umat Katolik di dalam wilayah negara bagian Maryland.¹³ Dengan jumlah populasi umat Katolik yang cukup signifikan dan stabil dari waktu ke waktu, menjadikan peran Gereja Katolik sebagai sorot utama dalam penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak, secara langsung berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi Gereja Katolik di wilayah Maryland.

Dalam laporan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Umum Maryland pada tahun 2023 yang berisi lebih dari 450 halaman yang telah disunting, mencakup hasil investigasi selama empat tahun—dimulai sejak tahun 2018—terhadap tuduhan-tuduhan pelecehan yang melibatkan Gereja Katolik. Laporan ini menyoroti kegagalan sistem Keuskupan Agung Baltimore dalam melindungi anak-anak yang berada di bawah naungannya.¹⁴

¹² Zorzi, *Supra* note 2.

¹³ Archdiocese of Baltimore, “Archdiocese of Baltimore: Our History.”

¹⁴ Maryland Attorney General, “Redacted Report on Child Sexual Abuse in the Archdiocese of Baltimore” (Baltimore, Maryland, 2023).

Hasil investigasi yang dipublikasikan melalui laporan tersebut telah mengidentifikasi sebanyak 156 pastor, diakon¹⁵, guru, dan seminarian¹⁶ di lingkungan Keuskupan Agung Baltimore yang dituduh melakukan kekerasan fisik dan pelecehan seksual terhadap lebih dari 600 anak dalam kurun waktu lebih dari 80 tahun.¹⁷ Melalui tinjauan terhadap ratusan ribu dokumen gereja yang berasal dari tahun 1940-an, dewan juri menemukan bukti sistematis atas upaya untuk menutupi tindakan-tindakan ini, mengungkap tragedi yang terus berulang selama beberapa dekade.¹⁸

Setelah laporan tersebut dipublikasikan, Uskup Agung Baltimore menyampaikan permintaan maaf kepada para korban, mengakui bahwa laporan tersebut mengungkap detail ‘tercela’ dalam sejarah Keuskupan Agung Baltimore yang tidak boleh diabaikan maupun dilupakan.¹⁹ Keuskupan Agung juga melaporkan telah membayar kompensasi sebesar lebih dari 13,2 juta dolar AS kepada 301 korban kekerasan dan pelecehan sejak tahun 1980-an.²⁰

Namun demikian, laporan itu juga mencatat bahwa para pemimpin gereja lebih berfokus pada upaya menutupi kasus-kasus kekerasan tersebut agar tidak muncul ke permukaan daripada menghentikan siklus kekerasan dan pelecehan atau melindungi korban.²¹ Upaya tersebut meliputi berbagai langkah untuk melindungi anggota klerus yang tertuduh, seperti memperbolehkan mereka pensiun dengan dukungan finansial, membiarkan mereka tetap aktif dalam pelayanan gereja, dan terbukti gagal melaporkan tindakan kriminal ini kepada penegak hukum.²²

¹⁵ Diakon merupakan anggota diakonat, yaitu jabatan pelayanan di Gereja.

¹⁶ Seminarian, atau seminaris merupakan pria yang sedang mempertimbangkan panggilan Tuhan untuk menjadi pendeta di Gereja Katolik Roma.

¹⁷ CBS Baltimore Staff, *Supra* note 5.

¹⁸ Zorzi, *Supra* note 2.

¹⁹ Lea Skene, Brian Witte, and Sarah Brumfield, “Report Details ‘Staggering’ Church Sex Abuse in Maryland,” *AP News*, April 6, 2023, <https://apnews.com/article/baltimore-archdiocese-sex-abuse-report-7d5d3af098da59a1c9313a246566638c>.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Maniscalco, *Supra* note 9.

²² Skene, Witte, and Brumfield, *Supra* note 19.

Akuntabilitas *Holy See* dalam kasus yang terjadi di lingkungan Keuskupan Baltimore menjadi salah satu hal penting yang menjadi fokus publik di Amerika Serikat. Hakim federal di Louisville menolak permintaan *Holy See* untuk membatalkan gugatan pelecehan seksual, menunjukkan bahwa *Holy See* berusaha untuk menggunakan imunitas yang didapatkan dari status kedaulatannya untuk menolak adanya keterlibatan dalam kasus ini.²³

Selain itu, adanya hukum kanonik dalam institusi Gereja Katolik, salah satunya yang terdapat dalam dokumen *Crimen sollicitationis*²⁴, menekankan bagaimana otoritas yang diberikan oleh *Holy See* kepada *Congregations of the Doctrine of the Faith* memungkinkan adanya intervensi langsung dalam kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual ini melalui proses internal Gereja.²⁵

2.2 Respons Pemerintah AS Terhadap *Holy See*

Tindakan *Holy See* dalam menangani kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak di Amerika Serikat, khususnya di lingkungan Keuskupan Baltimore, dinilai cenderung lebih mementingkan perlindungan nama baik institusi *Holy See* itu sendiri dan sangat tidak berfokus pada perlindungan dan pemulihak hak-hak para korban-penyintas. Kebijakan *Holy See* yang kebanyakan bersifat rahasia dan tertutup yang melindungi pelaku tertuduh juga menyebabkan sulitnya akses bagi para penegak hukum untuk menindak para pelaku anggota klerus yang terlibat dalam kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak.

Upaya perlindungan pelaku dan penutupan kasus-kasus ini oleh *Holy See* menuai kritik dan kecaman dari berbagai pihak. Kecaman bagi *Holy See* salah satunya disampaikan oleh para korban-penyintas yang

²³ Chaz Muth, "Abuse Case Against Vatican Can Go Forward," *National Catholic Reporter*, December 1, 2008, <https://www.ncronline.org/news/abuse-case-against-vatican-can-go-forward>.

²⁴ Secara literal berarti "kejahatan bujukan", merupakan instruksi yang dikeluarkan oleh *Holy See* pada tahun 1962 untuk menangani kasus pelecehan dan kekerasan seksual.

²⁵ Vatican City (Holy See), "Instruction on the Manner of Proceedings in Causes Involving the Crime of Solicitations" (Vatican Polyglot Press, 1962), https://www.vatican.va/resources/resources_crimen-sollicitationis-1962_en.html.

menuntut *Holy See* atas kebijakan kerahasiaan mereka dalam menangani kasus pelecehan dan kekerasan seksual di AS. Pada tahun 2019, sebanyak tujuh orang yang menjadi korban pelecehan oleh pastor di Gereja Katolik saat mereka masih anak-anak melaporkan Vatikan ke pengadilan federal di New York atas kebijakan mengenai kerahasiaan mereka yang diterapkan oleh para uskup di AS yang telah secara efektif mendukung terjadinya pelecehan dan kekerasan dilakukan oleh beberapa anggota klerus.²⁶ Tuntutan lain juga dilayangkan oleh lima orang korban lainnya ke pengadilan Minnesota agar *Holy See* merilis daftar yang berisi 3.400 nama para anggota klerus yang dirujuk ke Vatikan atas kasus pelecehan dan kekerasan, juga beserta dengan “file dan sejarah terkait” mereka.²⁷

Pemerintah AS sendiri memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan *Holy See*, memberikan saluran yang baik bagi kedua pihak untuk mengatasi isu-isu sensitif, khususnya isu mengenai pelecehan dan kekerasan terhadap anak. Pemerintah AS telah mendukung berbagai upaya internasional untuk menuntut pertanggungjawaban *Holy See* atas penanganan kasus pelecehan dan kekerasan yang terjadi. Salah satu dukungan yang ditunjukkan adalah dukungan terhadap inisiatif yang dihasilkan PBB untuk mendesak *Holy See* agar lebih memperkuat langkah-langkah perlindungan dan memastikan bahwa para pelaku dimintai pertanggungjawabannya baik di bawah hukum sipil ataupun hukum kanonik²⁸, salah satunya melalui undang-undang yang mewajibkan pelaporan atas anggota klerus²⁹ yang menjadi pelaku pelecehan dan kekerasan, terlepas dari imunitas yang terkait dengan “kerahasiaan” dengan *Holy See*.³⁰ AS juga memberikan dukungan bagi

²⁶ Maria Caspani, “Alleged U.S. Sex Abuse Victims Sue Vatican over Secrecy Policy,” *Reuters*, December 18, 2019, <https://www.reuters.com/article/world/alleged-us-sex-abuse-victims-sue-vatican-over-secrecy-policy-idUSKBN1YL263/>.

²⁷ DW, “US Catholic Abuse Victims to Sue Vatican,” *DW*, May 14, 2019, <https://www.dw.com/en/us-catholic-abuse-victims-to-sue-vatican/a-48726281>.

²⁸ Hukum gerejawi internal.

²⁹ Golongan rohaniwan Gereja Katolik.

³⁰ Child Welfare Information Gateway, “Clergy as Mandatory Reporters of Child Abuse and Neglect,” *Child Welfare Information Gateway*, 2023, <https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/clergymandated.pdf>.

penerapan UNCRC yang juga diratifikasi oleh *Holy See*, menekankan perlindungan terhadap anak-anak dari segala bentuk kekerasan.

Dalam menangani kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di AS, pemerintah AS juga telah mengubah beberapa kebijakan yang mempengaruhi bagaimana *Holy See* menanggapi kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak di wilayah AS. Beberapa negara bagian AS, termasuk Maryland di dalamnya, telah memperpanjang bahkan menghapus undang-undang yang membatasi pelaporan terhadap kasus pelecehan dan kekerasan anak.³¹ Perubahan ini memungkinkan para korban-penyintas melaporkan apa yang terjadi pada mereka tanpa ada batas waktu.

2.3 *Delaying Tactics* Dalam Penanganan Kasus Baltimore

Dalam penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Gereja Katolik, *Holy See* dan Hukum Kanonik nya sama-sama berfokus pada perlindungan nama baik dan reputasi Gereja Katolik itu sendiri dibandingkan dengan perlindungan korban yang menderita akibat anggota klerus.

Hukum Kanonik sendiri adalah serangkaian aturan atau hukum gerejawi yang mengatur Gereja. Hukum ini dibentuk dan dilaksanakan oleh hierarki Gereja Katolik untuk mengatur pemerintahan dan organisasi eksternal, bersifat mengikat khususnya bagi para uskup dalam menjalankan keuskupannya.

Pada tahun 1922, Paus Pius XI menerbitkan instruksi *Crimmen sollicitationis*, yang kemudian diubah pada tahun 1962 dengan catatan: "*to be kept carefully in the secret archive of the Curia for internal use. Not to be published or augmented with commentaries.*"³² Instruksi ini berfokus pada kejahatan bujukan untuk melakukan tindakan tidak senonoh dalam konteks pengakuan dosa. Instruksi ini juga membahas

³¹ Brian Witte, "Maryland's Highest Court Upholds Ending Statute of Limitations on Child Sex Abuse Lawsuits," *Associated Press*, February 4, 2025, <https://apnews.com/article/church-sex-abuse-children-maryland-fbe6790fad5e8ccd53dd2ecfba228aff>.

³² Vatican City (Holy See), *Supra* note 25.

mengenai kejahatan lain, yaitu “*de crimine pessimo*”³³, dimana kejahatan ini merupakan tindakan pelecehan atau tak senonoh yang dilakukan oleh anggota klerus terhadap anak-anak di bawah umur. Dalam *Crimen Sollicitationis* ini ditekankan bahwa siapapun yang terlibat dalam pemrosesan kasus pelecehan seksual oleh klerus terikat oleh “Rahasia Kantor Suci” (*Secret of the Holy Office*).³⁴ Artinya, seluruh informasi terkait pelanggaran seksual yang dilakukan oleh anggota Gereja harus disimpan secara tertutup di arsip rahasia Keuskupan (*secret archive of the Curia*) dan hanya untuk keperluan internal Gereja.

Kemudian pada tahun 1974, instruksi lain berjudul “*Secreta Continere*”³⁵ diterbitkan untuk mengganti Rahasia Kantor Suci (*Secret of the Holy Office*) menjadi Rahasia Kepausan (*Pontifical Secret*).³⁶ Instruksi ini mengklarifikasi bahwa Rahasia Kepausan ini mencakup semua proses pidana mengenai kejahatan besar yang ditangani oleh *Congregation for the Doctrine of Faith*, termasuk di dalamnya kasus-kasus pelecehan dan kekerasan terhadap anak.³⁷

Crimen Sollicitationis memperkenalkan pendekatan pastoral sebagai sarana disipliner bagi anggota pendeta yang melakukan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu hukuman yang seringkali diterapkan kepada anggota klerus yang terbukti bersalah dalam kasus pelecehan dan kekerasan seksual adalah hukuman berupa pengawasan khusus oleh petinggi lain atau pemindahan pelaku dari keuskupannya ke keuskupan lain untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.³⁸ Tindakan umum lainnya adalah merelokasi anggota klerus yang tertuduh ke paroki atau negara lain tanpa berkewajiban untuk

³³ Memiliki arti “kejahatan paling keji”, merujuk pada bentuk kejahatan seksual yang dilakukan oleh anggota klerus terhadap anak laki-laki di bawah umur.

³⁴ Thomas Doyle, O.P., and J.C.D, “The 1962 Vatican Instruction “*Crimen Sollicitationis*,” Promulgated on March 16, 1962,” 2008.

³⁵ Dalam Bahasa Latin berarti “menjaga kerahasiaan”, merujuk pada instruksi yang dikeluarkan Vatikan tentang kewajiban proses hukum internal.

³⁶ Matteo Visioli, “Confidentiality and the Pontifical Secret,” *Original Version in Italian: Periodica* 109, no. May 2010 (2020): 447–91.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Vatican City (Holy See), *Supra* note 25.

melaporkan tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku kepada paroki barunya.³⁹

Rangkaian Hukum Kanonik yang mengatur hukuman bagi para anggota klerus yang melakukan tindak kejahatan, khususnya dalam konteks pelecehan dan kekerasan terhadap anak, sejatinya menghambat penanganan kasus-kasus ini yang terjadi di lingkungan Keuskupan Baltimore. Hukum-hukum tersebut juga turut menghambat penerapan perlindungan hak-hak anak sebagaimana disetujui dalam UNCRC sebagai standar internasional yang harus dipatuhi oleh *Holy See*.

Pada laporan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Umum Maryland, diungkapkan bahwa terdapat pola penyamaran atau penutupan kasus-kasus pelecehan dan kekerasan yang terjadi di Keuskupan Baltimore.⁴⁰ Pendekatan dan investigasi pastoral yang dilakukan oleh institusi Gereja Katolik dalam Keuskupan Baltimore seringkali berakhir dengan pemindahan pelaku dari paroki tanpa memberikan alasan yang jelas soal penyebab pemindahannya dilakukan.

Laporan ini menyebutkan beberapa contoh kasus terkait dengan penanganan tersebut. Pada tahun 1960, institusi Gereja gagal menginvestigasi dan melaporkan tindak pelecehan yang dilaporkan oleh beberapa orang tua atas Bapa Joseph Maskell. Alih-alih melakukan investigasi, Joseph Maskell justru dialih-tugaskan menjadi rohaniwan di Sekolah Menengah Archbishop Keough di tahun 1969.⁴¹ Contoh kasus lainnya adalah di tahun 1964, dimana Bapa Lawrence Brett mengakui bahwa ia telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak laki-laki di Connecticut.⁴² Tindak lanjut dari pengakuan ini berupa penempatan di tempat rehabilitasi di New Mexico, kemudian pada tahun 1969 ia ditempatkan kembali di Sekolah Menengah Calvert Hall College.⁴³

³⁹ Hidalgo, *Supra* note 9.

⁴⁰ Maryland Attorney General, *Supra* note 14.

⁴¹ Zorzi, *Supra* note 2.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

Pada akhirnya, mekanisme hukuman berupa pemindahan pelaku dan hal-hal lain yang menunda proses hukum dalam penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Keuskupan Baltimore ini bukan hasil keputusan independen keuskupan itu sendiri. Kebijakan-kebijakan yang diambil tersebut diatur melalui serangkaian Hukum Kanonik, seperti *Crimen Sollicitationis* dan instruksi *Secreta Continere* yang menetapkan sanksi-sanksi disipliner berupa relokasi atau penghapusan dari kegiatan keagamaan, harus dilakukan dengan arahan dan pengawasan dari *Holy See*. Dengan demikian, tindakan relokasi dan penundaan yang terjadi merupakan bagian dari strategi untuk melindungi nama baik institusi Gereja.

Dalam perlindungan hak anak dan penerapan standar internasional sesuai yang tercantum di dalam UNCRC, mekanisme yang sifatnya rahasia dan terpusat seperti Hukum Kanonik Gereja Katolik ini sejatinya telah menghambat realisasi perlindungan tersebut. Prosedur-prosedur yang diinstruksikan lewat *Crimen sollicitationis* dan *Secreta Continere* cenderung mengutamakan perlindungan reputasi institusi Gereja Katolik daripada transparansi dan keadilan bagi para korban. Akibatnya, informasi penting yang terkait dengan pelanggaran dan penyembunyian kasus pelecehan dan kekerasan seksual tidak dapat diakses secara terbuka, baik oleh publik maupun oleh aparat penegak hukum, sehingga korban-penyintas mengalami keterbatasan dalam memperoleh keadilan bagi kasusnya. Dengan demikian, Hukum Kanonik ini cenderung tidak sejalan dengan prinsip-prinsip UNCRC yang menuntut mekanisme transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hak-hak korban dalam setiap proses peradilan.

Selain itu, proses seperti pemindahan pelaku tanpa penjelasan rinci dan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan juga mengganggu penerapan sanksi yang adil terhadap kejahatan seksual terhadap anak. Proses ini mencerminkan penolakan untuk mengambil langkah hukum yang tegas agar pelaku masih dapat terus bekerja di dalam sistem internal Gereja. Upaya-upaya ini turut menghambat pemenuhan

kewajiban internasional Gereja Katolik atau *Holy See* untuk melindungi anak sesuai dengan apa yang disetujui di dalam UNCRC.

2.4 Reframing oleh Holy See dalam Narasi Publik Baltimore

Reframing merupakan strategi yang dilakukan oleh *norm antipreneurs* yang menjadi salah satu taktis penting mereka dalam melakukan *resistance* terhadap norma tertentu. *Norm antipreneurs* kerap kali melakukan *reframing* untuk menghubungkan kembali norma yang baru dengan norma yang telah ada sebelumnya.⁴⁴ Strategi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengacaukan keabsahan norma baru tersebut, menghubungkannya dengan kemungkinan konflik yang bisa terjadi dengan kepercayaan atau nilai-nilai yang telah dipercayai sebelumnya.

Dengan membingkai norma baru ini dalam sudut pandang negatif, *antipreneurs* bisa dengan efektif menantang narasi yang dikedepankan oleh para *norm entrepreneurs*. Hal ini termasuk upaya-upaya yang melibatkan norma-norma baru ini digambarkan sebagai hal yang tidak realistis, berbahaya, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, yang dapat menimbulkan kerugian di antara para pemangku kepentingan.⁴⁵ Strategi *reframing* ini bukan hanya tentang menentang norma baru yang bertentangan saja, namun juga untuk menekankan *status quo*.

Norm antipreneurs yang secara efektif terus menyuarakan keresahan mereka dan menggambarkan norma-norma baru sebagai norma yang problematik dapat mempertahankan struktur kekuasaan dan menghindari perubahan normatif yang berlawanan dengan kepentingan mereka.⁴⁶

Dalam menanggapi laporan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Maryland tepat pada perayaan *Holy Week*⁴⁷ di tahun 2023, Uskup Agung

⁴⁴ Alan Bloomfield, "Norm Antipreneurs and Theorising Resistance to Normative Change," *Review of International Studies* 42, no. 2 (2015): 310–33, <https://doi.org/10.1017/S026021051500025X>.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Dikenal juga sebagai Pekan Suci, pekan terakhir tahun liturgi Gereja Katolik yang dimulai dari Minggu Palma (peringatan masuknya Yesus ke Yerusalem) hingga Minggu Paskah.

Baltimore, William E. Lori menyampaikan pernyataan yang menanggapi laporan tersebut. Dalam pernyataannya, Lori menyampaikan bahwa detail pelecehan dan kekerasan yang ada dalam laporan tersebut “sangat mengejutkan” dan “menyayat jiwa”.⁴⁸ Ia juga menyampaikan bahwa laporan tersebut merinci masa-masa tercela dalam sejarah Keuskupan Agung Baltimore yang tidak akan pernah diabaikan ataupun dilupakan.⁴⁹ Pernyataan ini secara keseluruhan menyampaikan komitmen dari Keuskupan Baltimore sepenuhnya untuk menerapkan hukuman yang adil bagi para pelaku, termasuk dengan mempublikasikan daftar yang berisi nama-nama anggota klerus yang tertuduh melakukan pelecehan dan kekerasan, juga meyakinkan publik mengenai komitmen Keuskupan dalam mengikuti perubahan nilai-nilai dan budaya dalam menerapkan keadilan bagi para korban-penyintas.⁵⁰

Lebih lanjut lagi, *Holy See* melalui *Letter Sent by the Holy Father to the Bishops of the United States Conference of Catholic Bishops* mengakui bahwa kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di Amerika Serikat telah menghancurkan kredibilitas Gereja, terlebih lagi melalui upaya-upaya untuk menyembunyikan dan menutupi kasus-kasus tersebut.⁵¹ Paus Fransiskus dalam hal ini menekankan bahwa dalam melawan budaya kekerasan, hilangnya kredibilitas, dan diskredit misi yang dijalankan Gereja, mereka memerlukan pendekatan yang tegas dan diperbarui. Ia menegaskan bahwa Gereja di Amerika Serikat memerlukan perubahan dalam cara berpikir, bertindak, dan berdoa untuk memulihkan kredibilitas mereka.⁵² Dalam surat tersebut, Paus Fransiskus juga menegaskan bahwa kepercayaan tidak akan tumbuh melalui pembentukan komite atau dekret keras, melainkan melalui

⁴⁸ Archbishop William E. Lori, “A Message from Archbishop William E. Lori on the Maryland Attorney General’s Report,” Archdiocese of Baltimore, 2023, <https://www.archbalt.org/a-message-from-archbishop-william-e-lori-on-the-maryland-attorney-generals-report/>.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Pope Francis, “Letter Sent by the Holy Father to the Bishops of the United States Conference of Catholic Bishops,” Vatican, 2019, https://www.vatican.va/content/francesco/en/letters/2019/documents/papa-francesco_20190101_lettera-vescovi-usa.html.

⁵² *Ibid.*

layanan yang rendah hati dan kolaboratif serta menerapkan tata kelola yang transparan dalam mengelola kekuasaan dan sumber daya mereka.

Narasi publik yang diberikan oleh *Holy See* terkait kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di Keuskupan Baltimore tidak menunjukkan adanya keberatan atau penolakan terhadap penerapan atau perubahan norma di dalam badan Gereja. *Holy See* membingkai ulang norma-norma terkait perlindungan anak yang juga tercantum di dalam UNCRC di dalam aturan-aturan internal Gereja, dari yang sebelumnya berpusat pada kekebalan klerikal dan kerahasiaan, menjadi lebih berfokus ke transparansi, kewajiban untuk melapor, dan akuntabilitas yang lebih besar.

Pada tahun 2018, Paus Fransiskus untuk pertama kalinya bersuara, memecah keheningan institusional selama bertahun-tahun dengan secara langsung mengakui besarnya pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota klerus dan menghimbau tindakan yang transparan.⁵³ Narasi publik ini kemudian mengubah kedudukan perlindungan korban-penyintas yang tadinya bukan sebagai prioritas utama menjadi kewajiban moral utama Gereja. Lebih lanjut pada pertemuan "*Protection of Minors*" di tahun 2019, Paus Fransiskus kembali menegaskan bahwa perlindungan anak-anak dan kelompok yang rentan merupakan keharusan yang menjadi bagian dari keimanan, menandakan bahwa proses dan prosedur kanonik harus sesuai dengan ajaran dan perintah Injil mengenai keadilan dan belas kasihan.⁵⁴

Dalam *Proprio Motu*⁵⁵ berikutnya yang diterbitkan tahun 2019, yaitu *Proprio Motu Vos Estis Lux Mundi*,⁵⁶ *Holy See* juga telah mewajibkan pelaporan terhadap tuduhan pelecehan dan kekerasan

⁵³ Pope Francis, "Letter of His Holiness Pope Francis to the People of God," Vatican, 2018, https://www.vatican.va/content/francesco/en/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html.

⁵⁴ Pope Francis, "Meeting on the Protection of Minors in the Church - Address of His Holiness Pope Francis at the End of the Eucharistic Concelebration."

⁵⁵ Dalam Bahasa Latin berarti "atas inisiatif sendiri", merupakan dokumen atau Keputusan resmi yang dikeluarkan Paus tanpa adanya permintaan dari pihak lain yang memiliki kekuatan hukum, biasanya digunakan untuk mengubah kebijakan internal, menetapkan aturan baru, atau mengambil tindakan terkait masalah tertentu.

⁵⁶ Memiliki arti "Kamu adalah terang dunia", merupakan *motu proprio* yang dikeluarkan Paus Fransiskus sebagai respons terhadap skandal pelecehan seksual di Gereja Katolik di berbagai negara.

seksual terhadap anak, melembagakan struktur investigasi yang wajib dilakukan oleh keuskupan.⁵⁷

Holy See dalam narasi publiknya tidak menunjukkan adanya upaya *reframing* atau penolakan untuk mengubah norma dan kepercayaan yang telah dipercayai sebelumnya untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang harus dipatuhi saat ini. Sebaliknya, Gereja menunjukkan keterbukaan terhadap perubahan budaya di lapisan masyarakat yang mengharuskan Gereja untuk "melayani" umatnya agar kepercayaan dan misi mereka tetap terjaga dengan cara memastikan aturan dan tindakan yang transparan dan rendah hati.

2.5 Counter Norm Promotion dalam Kasus Baltimore

Counter norm promotions yang dilakukan oleh *norm antipreneurs* sebagai upaya untuk mempertahankan norma lama yang sudah dipercayai sebelumnya dan untuk menghadapi juga menolak norma-norma baru yang didorong oleh *norm entrepreneurs* membantu *antipreneurs* untuk mempertahankan struktur kekuasaan mereka atau memblokir perubahan normatif yang dapat merugikan mereka.⁵⁸ Dalam hal ini, mereka kerap memanfaatkan status quo yang bersifat institusional yang akhirnya dapat menghambat pelaksanaan nyata norma baru.⁵⁹

Dalam laporan Kejaksaan Maryland yang mengungkap lebih dari 150 pendeta di Gereja Katolik dalam lingkungan Keuskupan Baltimore, para pelaku ini sering kali berhasil melarikan diri dari tanggung jawab yang seharusnya.⁶⁰ Laporan ini menekankan penutupan kasus-kasus tersebut dilakukan oleh para pemimpin Gereja dari berbagai kasus sejak

⁵⁷ Pope Francis, "Apostolic Letter Issued Motu Proprio by the Supreme Pontiff Francis 'Vos Estis Lox Mundi,'" Vatican News, 2019, https://www.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html.

⁵⁸ Bloomfield, *Supra* note 44.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Skene, Witte, and Brumfield, *Supra* note 19.

tahun 1940-an.⁶¹ Laporan ini berhasil merekam kasus kekerasan dan usaha penyamarannya yang dilakukan selama lebih dari 60 tahun.⁶²

Gereja Katolik dalam hal ini lebih memilih untuk melindungi reputasinya dan cenderung menghindari skandal alih-alih melindungi hak anak-anak di bawah naungan mereka. Para anggota klerus yang tertuduh melakukan pelecehan dan kekerasan ini seringkali 'diampuni' dan tindak lanjut yang diambil oleh Gereja Katolik adalah rekolasi pelaku ke wilayah lain sebagai bentuk kesempatan kedua bagi mereka.⁶³ Aksi relokasi ini merupakan salah satu bentuk perlindungan norma tradisional yang dianut Gereja Katolik.

Perlindungan dan pembelaan nilai dan norma yang dipercayai Gereja Katolik ini juga ditunjukkan dari bagaimana Paus sebelum Paus Fransiskus menanggapi skandal ini. Paus Yohanes Paulus II saat kepemimpinannya menyalahkan institusi-institusi di luar Gereja Katolik yang berada di luar kuasa mereka, dimulai dari media dan masyarakat itu sendiri hingga keberadaan 'iblis' yang misterius yang mengganggu Gereja, alih-alih menginvestigasi struktur Gereja yang berkemungkinan memfasilitasi terbentuknya pedofilia di dalamnya.⁶⁴

Cenderung berlawanan dengan Paus sebelumnya, Paus Fransiskus memilih pendekatan yang lebih progresif dalam menanggapi dan mengatasi skandal ini. Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki sistem Gereja dalam menangani kasus-kasus pelecehan dan kekerasan terhadap anak yang terjadi, khususnya dalam rentang waktu tahun 2018-2022, terutama saat Uskup Agung Baltimore, William E. Lori, dipercayai oleh Paus Fransiskus memberikan arahan langsung agar investigasi secara menyeluruh dapat dilakukan.⁶⁵ Salah satu hasilnya adalah terbentuknya saluran siaga bagi korban, merujuk pada

⁶¹ Zorzi, *Supra* note 2.

⁶² Skene, Witte, and Brumfield, *Supra* note 19.

⁶³ Hidalgo, *Supra* note 9.

⁶⁴ T. Krebs, "Church Structures That Facilitate Pedophilia among Roman Catholic Clergy," in *Wolves within the Folds: Religious Leadership and Abuses of Power*, ed. Allen Shupe (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1998), 15–32.

⁶⁵ Nicole Winfield and Associated Press, "Pope OKs Probe into U.S. Bishop over Sex Harassment Claims," *PBS News*, September 13, 2018, <https://www.pbs.org/newshour/nation/pope-oks-probe-into-u-s-bishop-over-sex-harassment-claims>.

penerapan mekanisme pelaporan yang tercantum di dalam *Vos Estis Lox Mundi*.⁶⁶ Sejak tahun 2018, Paus Fransiskus juga menekankan bagaimana Gereja akan melakukan usaha terbaik mereka dalam memberikan hukuman yang sepatutnya bagi para pelaku. Pertemuannya dengan *U.S Conference of Catholic Bishops* di tahun 2018 juga menyerukan tindakan yang transparan dan tegas, mendesak para uskup untuk membentuk norma-norma baru yang lebih universal.⁶⁷

Berbeda dengan Paus Yohanes Paulus II yang menyalahkan hal-hal di luar kuasa Gereja, Paus Fransiskus terlihat lebih konsisten dalam menggambarkan kekerasan dan pelecehan yang terjadi sebagai bukti dari kerusakan sistem itu sendiri dan perlunya perbaikan struktural dalam menangani hal ini.

Tidak terdapat bukti jelas tentang bagaimana Gereja Katolik membela norma-norma internal mereka atau berlaku defensif dengan cara menegaskan kembali hak-hak istimewa kanonik lama di atas akuntabilitas sipil. Paus Fransiskus khususnya, telah mendukung dilakukannya investigasi yang berbasis kerja sama sipil. Kepemimpinan Paus Fransiskus juga telah memperluas kerangka kerja *zero-tolerance* yang dimiliki *Holy See*, menjadikan kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Keuskupan Baltimore bukan hanya sekadar materi gerejawi yang picik, tetapi sebagai bagian dari kewajiban masyarakat secara keseluruhan untuk melindungi hak-hak anak.

2.6 Resistensi *Holy See* dan Implikasinya Bagi UNCRC

Resistance sejatinya bukan sekadar bentuk penolakan yang pasif, melainkan dapat berbentuk sebagai strategi aktif yang dilakukan oleh para antipreneurs untuk mempertahankan norma yang mereka percayai dan dianggap telah stabil atau mapan.⁶⁸ Mereka cenderung menolak perubahan normatif ini dan mempertahankan norma lama, dengan

⁶⁶ Winfield and Associated Press; Pope Francis, "Apostolic Letter Issued Motu Proprio by the Supreme Pontiff Francis 'Vos Estis Lox Mundi.'"

⁶⁷ Winfield and Associated Press, *Supra* note 65.

⁶⁸ Bloomfield, *Supra* note 44.

memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan berupa legitimasi atau kekuatan institusional dan prosedural yang telah melekat pada norma-norma tersebut.⁶⁹

Dalam konteks hubungan antara *Holy See* dan UNCRC, meskipun *Holy See* telah meratifikasi UNCRC pada tahun 1990, penerapan prinsip-prinsip untuk melindungi hak-hak anak yang tercantum dalam konvensi tersebut sering kali terhambat oleh adanya norma-norma internal Gereja yang cenderung lebih dikedepankan penerapannya, khususnya dalam menangani pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak oleh anggota klerus.

Holy See cenderung resisten terhadap beberapa standar internasional yang tercantum di dalam Konvensi, seperti yang disampaikan dalam tanggapannya terhadap laporan periodik dari CRC terhadap *Holy See*.⁷⁰

Melanjutkan laporan yang diterima dan dipublikasikan di tahun 2014 tersebut, pada 2019, pernyataan tertulis yang disampaikan oleh organisasi non-pemerintah *National Secular Society* di dalam sesi ke-42 Dewan HAM PBB menyoroti kinerja dan akuntabilitas *Holy See* terhadap UNCRC.⁷¹ Pernyataan ini mengkritik komitmen yang ditunjukkan *Holy See* dalam menerapkan rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan Komite sebelumnya, di antaranya sikap-sikap seperti keengganan terhadap penyerahan dokumen-dokumen penting kepada otoritas nasional negara-negara yang menangani kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak.⁷²

Selain itu, pertanyaan ini juga menunjukkan inkonsistensi mengenai status *Holy See*. *Holy See* sendiri mengklaim bahwa mereka tidak memiliki kewenangan hukum yang melampaui yurisdiksi antar negara. Namun, pada dokumen-dokumen internal Gereja seperti

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Committee on the Rights of the Child, "Committee on the Rights of the Child Concluding Observations on The Second Periodic Report of the Holy See," *International Legal Materials* 53, no. 3 (2014): 580–96, <https://doi.org/10.5305/intelegamate.53.3.0580>.

⁷¹ Human Rights Council, "Written Statement Submitted by National Secular Society, a Non-Governmental Organization in Special Consultative Status," *United Nations General Assembly*, 2019, <https://doi.org/10.1017/S0020818300012881>.

⁷² *Ibid.*

*Crimmen Sollicitationis*⁷³ dan adanya *Congregations of the Doctrine of Faith (CDF)* dalam penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Gereja, *Holy See* menunjukkan kontrol yurisdiksinya atas perkara tersebut.⁷⁴

Dalam pertanyaan ini, NGO *National Secular Society* juga menyebutkan bahwa *Holy See* tidak menunjukkan adanya “*evidence of implementation of Concluding Observations*”, terutama dalam rekomendasi untuk segera memberhentikan para pelaku terkait pelecehan dan kekerasan seksual, dimana praktik pemindahan pelaku dan penundaan tindak lanjut terhadap pelaporan masih tetap terjadi.⁷⁵

Hal-hal tersebut juga turut berdampak pada korban-penyintas, dimana mereka cenderung sulit untuk mengakses informasi-informasi penting hingga sulitnya pemulihan hak bagi mereka akibat sistem yang menuntut “*Secret of the Holy Office*.”⁷⁶

Dengan adanya ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip di dalam UNCRC dengan prinsip-prinsip internal Gereja, resistensi ini dapat berdampak langsung terhadap pemenuhan hak dan kepentingan terbaik anak sesuai dengan prinsip fundamental UNCRC.

Meskipun demikian, *Holy See* telah membuat tonggak baru yang menandai perubahan yang cukup signifikan terhadap penanganan pelecehan dan kekerasan seksual oleh anggota klerus melalui *Motu Proprio Vos Estis Lux Mundi*. *Motu Proprio* ini memperkenalkan sistem pelaporan yang bersifat transparan, terstruktur, dan universal. Hal ini menunjukkan kesediaan *Holy See* terhadap perubahan aturan yang diperlukan dan terbuka terhadap norma-norma yang disetujui dalam UNCRC.

⁷³ Instruksi yang dikeluarkan oleh *Holy See* pada tahun 1962 untuk menangani kasus pelecehan dan kekerasan seksual.

⁷⁴ Human Rights Council, *Supra* note 71.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

3. KESIMPULAN

Holy See memiliki posisi ganda yang kompleks dalam sistem hukum internasional, yaitu sebagai subjek hukum yang berdaulat di kancah internasional dan sebagai otoritas tertinggi institusi religius Gereja Katolik. Status *sui generis* ini memberikan legitimasi moral dan diplomatik di forum internasional, namun juga menciptakan ambiguitas dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum, khususnya dalam isu pelanggaran hak anak. Status ini sering digunakan untuk mengklaim imunitas atau batasan yurisdiksi atas peristiwa yang terjadi di luar wilayah teritorial Vatikan.

Status *Holy See*, baik sebagai entitas religius dan sebagai subjek hukum internasional yang memiliki kedaulatan, telah memberikan hak istimewa dalam penanganan kasus yang terkait dengan pelanggaran hak-hak anak. Intervensi yang kebanyakan berupa tindakan yang didasari dari Hukum Kanonik seringkali berujung pada prioritas perlindungan nama baik institusi di atas perlindungan korban, menyebabkan penerapan nilai-nilai dan standar internasional yang tercantum di dalam UNCRC menjadi tidak optimal.

Terlepas dari resistensi *Holy See* terhadap evaluasi yang diberikan oleh *Committee on the Rights of the Child*, *Holy See* sendiri terlihat sudah jauh lebih terbuka, dibuktikan dengan diterbitkannya *Proprio Motu* “*Vos Estis Lux Mundi*” di tahun 2019 oleh Paus Fransiskus. *Holy See* juga sudah mulai menerapkan *best practices* seperti kewajiban pelaporan pelaku kepada pihak otoritas sipil. Hal ini memperlihatkan intervensi *Holy See* yang dinilai sebagai *norm antipreneur* telah menjadi lebih fleksibel dan terbuka terhadap penerapan norma dan standar internasional terkait Konvensi ini.

Peningkatan transparansi yang ditunjukkan oleh *Holy See* ini dapat membantu institusi dalam memperoleh kembali kepercayaan publik terhadap akuntabilitasnya. Meskipun begitu, status unik *Holy See* masih dapat menimbulkan dilema dan tantangan legal dan institusional. Pembukaan akses dan pengakuan kesalahan yang telah dilakukan masih harus diikuti penyesuaian Hukum Kanonik agar dapat selaras dengan standar internasional di dalam UNCRC yang harus dipatuhi *Holy See* sebagai pihak yang meratifikasinya sesuai dengan reservasi yang telah dibuat.

REFERENSI

- Archbishop William E. Lori. "A Message from Archbishop William E. Lori on the Maryland Attorney General's Report." Archdiocese of Baltimore, 2023. <https://www.archbalt.org/a-message-from-archbishop-william-e-lori-on-the-maryland-attorney-generals-report/>.
- Archdiocese of Baltimore. "Archdiocese of Baltimore: Our History." Archdiocese of Baltimore, 2023. <https://www.archbalt.org/the-archdiocese/our-history/#:~:text=The Archdiocese of Baltimore was,a Catholic population of 486%2C607>.
- Bloomfield, Alan. "Norm Antipreneurs and Theorising Resistance to Normative Change." *Review of International Studies* 42, no. 2 (2015): 310–33. <https://doi.org/10.1017/S026021051500025X>.
- Caspani, Maria. "Alleged U.S. Sex Abuse Victims Sue Vatican over Secrecy Policy." *Reuters*, December 18, 2019. <https://www.reuters.com/article/world/alleged-us-sex-abuse-victims-sue-vatican-over-secrecy-policy-idUSKBN1YL263/>.
- CBS Baltimore Staff. "Read the Full Redacted Report on Sex Abuse in Baltimore Archdiocese Released by AG's Office." *CBS News*, April 5, 2023. <https://www.cbsnews.com/baltimore/news/read-the-full-redacted-report-sex-abuse-baltimore-archdiocese-church-wjz/>.
- Child Welfare Information Gateway. "Clergy as Mandatory Reporters of Child Abuse and Neglect." *Child Welfare Information Gateway*, 2023. <https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/clergymandated.pdf>.
- Committee on the Rights of the Child. "Committee on the Rights of the Child Concluding Observations on The Second Periodic Report of the Holy See." *International Legal Materials* 53, no. 3 (2014): 580–96. <https://doi.org/10.5305/intelegamate.53.3.0580>.
- Danisi, Carmelo, Tomas Caprara, and University of Bologna. "The UNCRC and The Holy See: How Issues of Statehood, Attribution, and Immunity Constrain Children's Rights." *Amicus Curiae* 5, no. 3 (2024): 493–510. <https://doi.org/10.14296/ac.v5i3.5708>.
- Doyle, Thomas, O.P., and J.C.D. "The 1962 Vatican Instruction "Crimen Sollicitationis," Promulgated on March 16, 1962," 2008.
- DW. "US Catholic Abuse Victims to Sue Vatican." *DW*, May 14, 2019. <https://www.dw.com/en/us-catholic-abuse-victims-to-sue-vatican/a-48726281>.

- Hidalgo, Gabriela. "Recurring Cardinal Sins: How the Holy See and Canon Law Have Perpetuated Child Sexual Abuse." *Children's Legal Rights Journal* 39, no. 2 (2019). <https://lawecommons.luc.edu/clrj/vol39/iss2/4>.
- Human Rights Council. "Written Statement Submitted by National Secular Society, a Non-Governmental Organization in Special Consultative Status." *United Nations General Assembly*, 2019. <https://doi.org/10.1017/S0020818300012881>.
- Krebs, T. "Church Structures That Facilitate Pedophilia among Roman Catholic Clergy." In *Wolves within the Folds: Religious Leadership and Abuses of Power*, edited by Allen Shupe, 15–32. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1998.
- Maniscalco, F. "Media Reports on the Sexual Abuse Crisis in the Catholic Church." Washington, 2005.
- Maryland Attorney General. "Redacted Report on Child Sexual Abuse in the Archdiocese of Baltimore." Baltimore, Maryland, 2023.
- Muth, Chaz. "Abuse Case Against Vatican Can Go Forward." *National Catholic Reporter*, December 1, 2008. <https://www.ncronline.org/news/abuse-case-against-vatican-can-go-forward>.
- Ostberg, R. "Holy See." *Encyclopedia Britannica*, 2024. <https://doi.org/10.18356/9789213585009c194>.
- Pope Francis. "Apostolic Letter Issued Motu Proprio by the Supreme Pontiff Francis 'Vos Estis Lox Mundi.'" *Vatican News*, 2019. https://www.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html.
- . "Letter of His Holiness Pope Francis to the People of God." Vatican, 2018. https://www.vatican.va/content/francesco/en/letters/2018/document_s/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html.
- . "Letter Sent by the Holy Father to the Bishops of the United States Conference of Catholic Bishops." Vatican, 2019. https://www.vatican.va/content/francesco/en/letters/2019/document_s/papa-francesco_20190101_lettera-vescovi-usa.html.
- . "Meeting on the Protection of Minors in the Church - Address of His Holiness Pope Francis at the End of the Eucharistic Concelebration." Sala Regia: Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana, 2019. <https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/februa>

ry/documents/papa-francesco_20190224_incontro-protezioneminori-chiusura.html.

Skene, Lea, Brian Witte, and Sarah Brumfield. "Report Details 'Staggering' Church Sex Abuse in Maryland." *AP News*, April 6, 2023. <https://apnews.com/article/baltimore-archdiocese-sex-abuse-report-7d5d3af098da59a1c9313a246566638c>.

Vatican City (Holy See). "Circular Letter to Assist Episcopal Conferences in Developing Guidelines for Dealing with Cases of Sexual Abuse of Minors." Libreria Editrice Vaticana, 2011. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20110503_abuso-minori_en.html.

———. "Instruction on the Manner of Proceedings in Causes Involving the Crime of Solicitations." Vatican Polyglot Press, 1962. https://www.vatican.va/resources/resources_crimen-sollicitationis-1962_en.html.

Visioli, Matteo. 2020. "Confidentiality and the Pontifical Secret." *Original version in italian: Periodica* 109(May 2010): 447–91.

Witte, Brian. "Maryland's Highest Court Upholds Ending Statute of Limitations on Child Sex Abuse Lawsuits." *Associated Press*, February 4, 2025. <https://apnews.com/article/church-sex-abuse-children-maryland-fbe6790fad5e8ccd53dd2ecfba228aff>.

Worster, William Thomas. "The Human Rights Obligations of the Holy See under the Convention on the Rights of the Child." *Duke Journal of Comparative & International Law* 31, no. 351 (2019): 351–423. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3470010>.

Winfield, Nicole, and Associated Press. "Pope OKs Probe into U.S. Bishop over Sex Harassment Claims." *PBS News*, September 13, 2018. <https://www.pbs.org/newshour/nation/pope-oks-probe-into-u-s-bishop-over-sex-harassment-claims>.

Zorzi, William F. "After Years of Investigation and Heartbreak, Report Detailing 'Horrendous' Allegations against Clergy Is Released." *Maryland Matters*, April 6, 2023. <https://marylandmatters.org/2023/04/06/after-years-of-investigation-and-heartbreak-report-detailing-horrendous-allegations-against-clergy-is-released/>.